

ABSTRACT

Unlicensed sand mining is one of the mining business activities that conducted without the permission of people's mining (IPR) and production business permit (IUP). Law enforcement on unlicensed sand mining perpetrators aims to determine the factors that cause unauthorized sand mining activities and to know the implementation of criminal law enforcement against unauthorized sand mining perpetrators for the establishment or functioning of legal norms as a behavior manual in relation- legal relationships in the life of society and state.

This research uses empirical juridical research method with the qualitative approach and the data source includes primary and secondary data. Primary data is the data derived from the facts in the field by interviews with the informant persons and distributing questionnaires, then secondary data are data obtained from legislation and leprosy study covering primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Unlicensed sand mining activities in Luk Ulo river of Kebumen is caused by several factors such as internal and external factors. These factors include economic factors, low education, weaknesses of supervision and law enforcement, remote and complicated permits also capital owners from outside the region. The process of implementation of criminal law enforcement on illegal sand mining in Luk Ulo river of Kebumen Regency get the sanction by law with the threat of Criminal Acts/Tipiring by the Kebumen District Court where the judicial process using quick examination and PPNS investigators conducting investigations and PPNS investigators has the authority of the prosecutor. In the process of investigation, PPNS investigators coordinate with the Supervisory Coordinator (KORWAS) in the jurisdiction and submitted a Letter of Instruction Commencement Command (SPDP) to the State Prosecutor.

The trial process is conducted by the District Court with a quick examination and the sanctions are given sanctions for minor crimes for violating Article 171 of Kebumen District Regulation No. 22 of 2011 about Mineral Coal Mining with a maximum imprisonment of 3 (three) months and a fine of Rp. 50.000.000., - (fifty million rupiah). The regulation on the sanction of the law refers to Article 14 of Law No. 10 of 2004 on the Establishment of Legislation and Article 37 and Article 67 of Law no. 4 of 2009 about Mineral Coal Mining.

The factors that cause in illegal sand mining that occurred in Luk Ulo river of Kebumen Regency are internal and external factors and the implementation of criminal law enforcement against sand less sand miners only in imprisonment penal sanctions and penalties for entry into the criminal act.

Keywords: Law Enforcement, Unlicensed Sand Mining, Criminal Sanctions.

ABSTRAK

Penambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan tanpa ada izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin usaha produksi (IUP). Penegakan hukum terhadap pelaku penambangana pasir tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilakukanya aktivitas penambangan pasir tanpa izin dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dimana sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber dan penyebaran kuisisioner, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan study kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kegiatan penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, perizinan yang jauh dan rumit serta pemilik modal dari luar wilayah. Proses pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen dikenakan sanksi Perda dengan ancaman Tindak Pidana Ringan/ Tipiring oleh Pengadilan Negeri Kebumen dimana dalam proses peradilan menggunakan acara pemeriksaan cepat dan penyidik PPNS yang melakukan penyidikan serta penyidik PPNS menjadi kuasa atas penuntut umum. Dalam proses penyidikan penyidik PPNS berkordinasi dengan Koordinator Pengawas (KORWAS) di wilayah hukum tersebut dan menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri. Proses persidangan dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan cepat dan sanksi yang diberikan adalah sanksi tindak pidana ringan karena melanggar Pasal 171 Perda Kabupaten Kebumen No. 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineraba dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda baling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Pengaturan pemberian sanksi Perda tersebut mengacu pada Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 37 dan Pasal 67 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Penambangan pasir tanpa izin di sungai luk ulo Kabupaten Kebumen terjadi karena adanya faktor faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, perizinan yang jauh dan rumit serta dari luar wilayah. Penegkan hukum terhadap pelaku penambang pasir kurang maksimal dimana sanksi yang diberikan sangatlah ringan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Pasir Tanpa Izin, Sanksi Pidana.